

## Abstrak

Isu sentral dari penelitian ini adalah karakteristik objek reklame yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah Kota Surabaya menurut Undang-Undang perpajakan di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum yang dapat dijadikan payung bagi penyelenggara reklame terhadap jaminan biaya bongkar reklame dan titipan uang pajak. Tipe dari penelitian ini adalah *doktrinal research*, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach*, yaitu suatu pendekatan permasalahan berdasarkan legislasi dan regulasi (pendekatan perundang-undangan). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan terhadap karakteristik pemungutan reklame pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yaitu adanya pemungutan jaminan biaya bongkar reklame dan munculnya titipan uang pajak sebagai akibat dari kesalahan penafsiran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam menafsirkan 2 (dua) sistem pemungutan pajak yang berlaku dalam Perda Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame. Bentuk perlindungan hukum yang kongkrit bagi penyelenggara reklame terhadap pemungutan jaminan biaya bongkar dan munculnya titipan uang pajak adalah perlindungan hukum dari perspektif hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Kata kunci: karakteristik, Perlindungan hukum, titipan uang pajak, jaminan biaya bongkar.